

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024-2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN/ FORMULASI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN			Kondisi Akhir Renstra
												2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Terciptanya Kabupaten Sumedang yang kondusif dan demokratis	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	(Jumlah Potensi konflik yang tertangani/Jumlah Total Potensi konflik)x100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman dan Penguatan Ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006; 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah. 5. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015.	%	100	100	100	100	100
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006; 2. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015.						
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013; 7.Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015.						

						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1. Undang – undang nomor 17 Tahun 2013; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, 3. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2016; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44; 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017; 10. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015.							
2		Tingkat Bina Demokratisasi	Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Bina Demokratisasi	(Jumlah Pembinaan Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD/Jumlah Total Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD)x100%	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2; 2. Undang - undang nomor 7 Tahun 2017; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009; 5. Permendagri 6 Tahun 2017; 7. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36; 9. Peraturan Bupati Sumedang No. 34 Tahun 2015;	%	100	100	100	100	100	

Sumedang, 31 Januari 2024
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SUMEDANG**

**BADAN
 KESBANG POL**

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si

NIP. 19660228 199901 1 001